

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan jasa adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan untuk memberikan pelayanan, kemudahan, dan kenyamanan kepada masyarakat untuk memperlancar aktivitas produksi maupun konsumsi. Perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaannya memerlukan investasi besar dengan kebutuhan dana yang besar pula agar mampu memuaskan konsumen dengan jasa yang diberikan sehingga tetap unggul dan dapat bertahan dalam persaingan bisnis dibidang jasa. Kebutuhan akan dana perusahaan dapat didapatkan melalui berbagai alternatif yakni salah satunya dengan menerbitkan atau memperdagangkan saham di Pasar Modal. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen (Martalena dan Maya Malinda, 2011: 3).

Sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang merupakan salah satu dari bagian sektor jasa. Sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi termasuk kedalam golongan sektor jasa yang bergerak dalam bidang pembangunan dan penyediaan sumber energi, transportasi, telekomunikasi, serta konstruksi non bangunan. Tercatat pada pertengahan tahun 2017 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kenaikan drastis pada 11,58% secara *year to date* (ytd) dengan adanya sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang tumbuh 15,45% (Bursa Efek Indonesia, 2017). Sehingga dapat dikatakan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi memiliki kekuatan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut catatan Bank Dunia, terdapat beberapa sektor yang dapat menjadi andalan Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor jasa merupakan salah satu pendorong pertumbuhan yang paling menjanjikan. Sektor ini

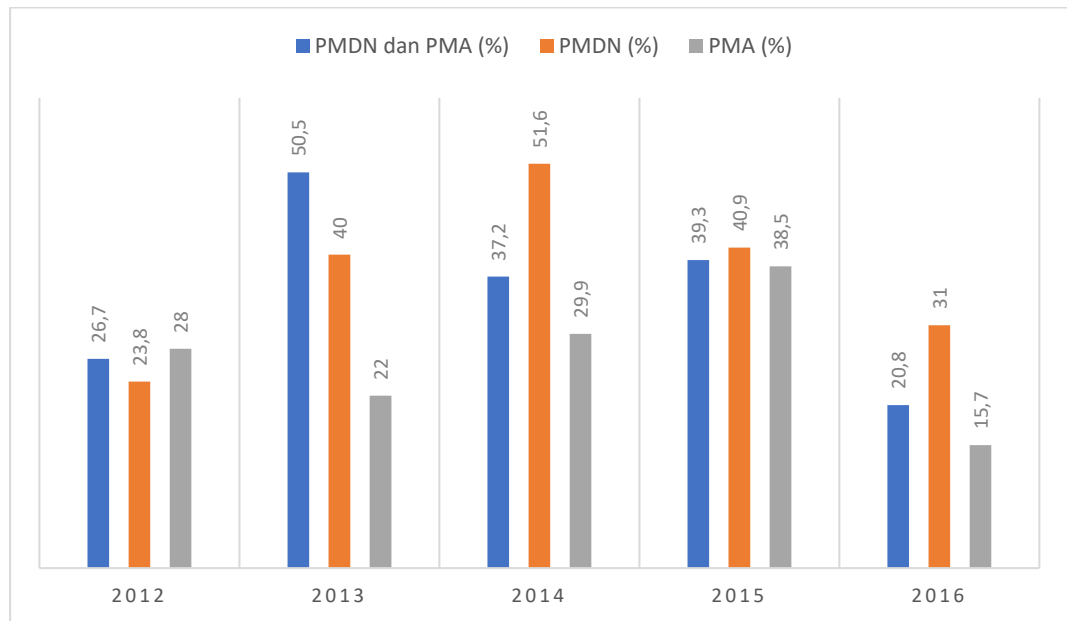
memiliki kontribusi yang meningkat terhadap perekonomian dan perdagangan Indonesia. Pentingnya sektor jasa bagi pertumbuhan ekonomi diperjelas oleh keterkaitan ke depan yang kuat ke seluruh sektor perekonomian lainnya. (Dedy Afrianto, 2017)

Pada sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi penilaian akan kinerja perusahaan pun terlihat dengan adanya pergantian manajemen baru. Hal ini disebabkan akan keinginan perusahaan untuk bertumbuh dengan cepat. Dengan adanya manajemen yang baru memungkinkan terjadinya perubahan seperti kebijakan dalam akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP.

Infrastruktur menjadi salah satu pilar penyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain telah menggerakkan ekonomi riil, turut menyumbang pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, juga telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Sektor konstruksi, pada tahun 2016 berada di posisi ketiga sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan kontribusi 0,51% setelah sektor Industri pengolahan dan sektor perdagangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,02%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 4,88%. (Badan Pusat Statistik)

Ketersediaan infrastruktur akan menjadi solusi atas masalah-masalah dasar yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan yang selama ini membelenggu sebagian penduduk Indonesia. Saat ini terus dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya dari Wilayah Timur Indonesia dan daerah pinggiran atau wilayah terdepan Indonesia, guna pemerataan ekonomi dan juga menurunkan ketimpangan ekonomi antar daerah. (Sugiarto, 2017)

Perkembangan pada pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini karena adanya proyek dan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 mengenai peningkatan investasi dan proyek yang telah dibangun pada sektor jasa seperti infrastruktur, utilitas, dan transportasi di Indonesia.



Gambar 1.1

Peningkatan Investasi dan Proyek pada Sektor Jasa

(Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal)

Dari data yang didapatkan pada Gambar 1.2, sektor jasa seperti infrastruktur, utilitas, dan transportasi merupakan salah satu hal yang dilihat oleh mata para investor global karena sektor ini terkait langsung dengan masyarakat, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Pada data di atas menunjukkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) pada tahun 2012-2016 nilai investasinya mengalami fluktuasi. Tahun 2012 angka PMDN dan PMA 26,7% dan di 2013 mengalami kenaikan sebesar 50,5%. Pada tahun 2014 angka PMDN dan PMA kembali turun yaitu sebesar 37,2% dan pada 2015 naik lagi menjadi 39,3%. Pada tahun 2016 periode Januari sampai dengan Maret mengalami penurunan kembali sebesar 20,8%.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan objek sektor jasa, khususnya di perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Alasan peneliti menggunakan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi karena, sektor-sektor tersebut menjadi faktor untuk mendukung pembangunan nasional. Investasi pada sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi

di suatu negara memiliki hasil yang tinggi, sehingga dapat berperan untuk menghasilkan stimulasi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Faktor-faktor yang mempengaruhi *Auditor Switching* yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Opini Audit, Pergantian Manajemen, dan *Financial Distress*. *Auditor switching* merupakan pergantian Kantor Akuntan Publik maupun auditor yang disebabkan oleh *auditee* maupun auditor. *Auditor switching* memiliki dua sifat yaitu dapat bersifat *mandatory* (wajib) atau *voluntary* (sukarela). *Auditor switching* bersifat *mandatory* terjadi karena melaksanakan kewajiban dari ketentuan regulasi yang berlaku. Sedangkan secara *voluntary* terjadi karena suatu alasan terdapat faktor-faktor tertentu dari pihak klien maupun KAP yang bersangkutan diluar ketentuan regulasi (Pawitri dan Yadyana, 2015). Jika pergantian auditor terjadi secara *voluntary*, maka faktor-faktor penyebab dapat berasal dari sisi klien (misalnya kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, *Initial Public Offering*, dan sebagainya) dan dari sisi auditor (misalnya *fee* audit, kualitas audit, dan sebagainya). Sampai saat ini, masih muncul pertanyaan mengapa perusahaan melakukan *auditor switching* secara *voluntary*. Di Indonesia, masih terdapat perusahaan yang melakukan perpindahan auditor secara *voluntary* (sukarela). Tanggung jawab auditor eksternal yaitu memberikan opini atas kewajaran pelaporan keuangan organisasi, terutama dalam penyajian posisi keuangan dan hasil operasi dalam suatu periode. Auditor eksternal juga menilai apakah laporan keuangan organisasi disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum, diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, dan seterusnya. Audit eksternal ini dapat dikatakan sebagai review atas laporan keuangan atau entitas pada perusahaan atau pemerintah yang dilakukan oleh tenaga profesional dan independen atau tidak ada sangkut-pautnya dengan perusahaan yang terkait.

External audit ini sangat berperan dalam pengawasan terhadap kondisi keuangan perusahaan dan pemerintah karena dikerjakan oleh tenaga profesional di luar perusahaan tersebut sehingga diharapkan bahwa penilaiannya obyektif. Pada umumnya perusahaan melakukan audit eksternal ini secara teratur sementara bagi pemerintah pada umumnya dilakukan dalam jangka waktu tahunan. Pada perusahaan audit eksternal ini difokuskan terhadap evaluasi trend dan identifikasi, juga peristiwa yang tak dapat dikontrol oleh perusahaan. Opini ini akan digunakan para pengguna laporan keuangan, baik di dalam organisasi terlebih di luar organisasi, antara lain untuk melihat seberapa besar tingkat reliabilitas laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi tersebut.

Di Indonesia, pergantian auditor terjadi secara mandatory. Peraturan mengenai pembatasan masa penugasan Kantor Akuntan Publik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 ayat (1), pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Kemudian ketentuan mengenai Akuntan Publik diperbarui dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi Akuntan Publik, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Setelah memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu perusahaan selama 5 tahun berturut-turut akuntan publik diwajibkan melakukan *cooling-off* selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Setelah periode *cooling-off* selesai, maka Akuntan Publik dapat kembali memberikan jasa audit pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang dimaksud dalam PP No. 20/2015 adalah industri di sektor pasar modal, bank umum, dana pensiun perusahaan asuransi/reasuransi, atau BUMN.

Peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk campur tangan dari pemerintah adanya peraturan yang mewajibkan adanya pergantian auditor. Karena pemerintah sebagai pihak regulator yang dapat memberikan pelayanan fasilitas dan keadilan bagi kepentingan semua pihak baik pihak perusahaan, pihak auditor, pihak

eksternal maupun pihak pemerintah (Aprianti, 2016). Dengan adanya regulasi tersebut, maka ada pembatasan masa pemberian jasa dan keharusan melakukan pergantian Akuntan Publik oleh suatu perusahaan.

Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus bersifat independen. Anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen didalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar professional akuntan publik. (Agoes, 2012:45). Kunci utama auditor dalam melakukan pengauditan ialah independensi auditor. Auditor wajib dalam memberikan penilaian dan opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diaudit. Dengan melakukan pergantian kantor akuntan publik, merupakan salah satu cara untuk menjaga independensi auditor. Independensi auditor dapat hilang jika auditor dan klien mempunyai hubungan pribadi, yang akan mempengaruhi sikap, mental dan opini auditor (Nasser *et al*, 2006) dalam Suarjana dan Widhiyani (2015). Dalam penelitian Ika & Wibowo (2011) untuk diakui sebagai seorang yang independen, akuntan publik tidak hanya bersifat objektif dan tidak memihak tetapi harus pula menghindari keadaan-keadaan yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat atas sikapnya. Hal ini bertujuan agar akuntan publik dapat memberikan opini yang objektif dan jujur atas laporan keuangan klien, sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan keuangan.

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan posisi keuangan (Harahap, 2008:105). Kinerja manajemen suatu perusahaan dapat ditunjukkan melalui penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen (Fahmi, 2014:6).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 1 Tahun 2017 tentang laporan keuangan adalah penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Entitas menerapkan Pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Laporan keuangan yang disajikan harus memiliki integritas agar pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun eksternal dapat menggunakannya dengan bijak dan dapat membuat keputusan yang semestinya. Pemegang saham dan CEO menginginkan laporan keuangan tampak baik di depan masyarakat, investor, dan debitur. Sedangkan auditor eksternal ingin melaporkan hasil audit laporan keuangan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Teori Keagenan (*Agency Theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Anthony dan Govindarajan (2002), menyatakan bahwa hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (*principle*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Dalam suatu korporasi, pemegang saham merupakan prinsipal dan CEO adalah agen mereka. Pemegang saham menyewa CEO dan mengharapkan CEO tersebut untuk bertindak bagi kepentingan mereka. Berdasarkan asumsi mengenai sifat manusia yang mementingkan dirinya sendiri dapat terlihat dari perilaku prinsipal dan agen. Pemegang saham (prinsipal) diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan sedangkan CEO (agen) diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari keterlibatannya dalam hubungan agensi, seperti memutuskan untuk melakukan *auditor switching* karena adanya ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu dengan auditor. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus perpindahan auditor di Indonesia dengan terdapatnya perusahaan yang melakukan *auditor switching* secara pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi.

Terdapat 11 perusahaan yang melakukan *auditor switching*. Data tersebut diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016 yang terdapat pada situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Penulis mengambil sektor jasa dalam penelitian ini khususnya pada perusahaan di atas yang termasuk kedalam sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi periode tahun 2012-2016.

Kasus pergantian auditor terjadi pada PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) yang mendapat sanksi penghentian sementara (*suspend*) perdagangan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi ini diberikan karena ditemukan banyak kesalahan di laporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. Karena adanya kesalahan dalam pelaporan laporan keuangan perusahaan tersebut, maka KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut dan mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas yang menyatakan bahwa penjualan perusahaan mengalami penurunan yang relatif besar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari Rp 1.667.819.207.326 turun menjadi Rp 31.555.694.146 serta pengakuan kerugian yang relatif besar atas divestasi Entitas Anak, penurunan nilai investasi pada perusahaan asosiasi, penghapusan asset eksplorasi. Dampak dari kedua hal tersebut dalam tahun berjalan perusahaan membukukan kerugian komprehensif sebesar Rp 1.790.992.856.062 yang berdampak menimbulkan defisit sebesar Rp 248.215.207.685. Kondisi tersebut mengidentifikasi adanya suatu ketidakpastian yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Perusahaan *investasi* tersebut menunjuk Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan rekan) untuk mengaudit laporan kinerja keuangannya. Sebelumnya Inovisi memakai KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan pada audit laporan keuangan 2013, pergantian KAP dilakukan agar kualitas penyampaian laporan keuangan Perseroan dapat meningkat sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Melihat kasus di atas, mengenai pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dinilai tepat untuk dilakukan penelitian dengan pertimbangan yang berdampak pada kinerja aktual perusahaan, hal ini dikarenakan adanya faktor yang

dapat mempengaruhi keputusan perusahaan terhadap pergantian auditor yakni opini audit, pergantian manajemen, dan *financial distress*.

Isu opini audit sering digunakan sebagai alasan oleh manajemen untuk mengganti KAP yang secara regulasi masih boleh melakukan audit di perusahaan yang bersangkutan. Kondisi ini muncul pada saat perusahaan klien tidak setuju dengan opini audit sebelumnya atau opini audit yang akan datang. Permasalahan ini dapat memicu salah satu pihak untuk memisahkan diri (Calderon and Ofobike, 2008 dalam Pratini 2013). Secara umum, *auditee* tentunya menginginkan laporan keuangannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari KAP yang disewanya. Luthfiyati (2016) telah melakukan penelitian yang berhasil membuktikan adanya pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Karliana (2017) menemukan bahwa opini audit tidak mempengaruhi perusahaan untuk berpindah KAP.

Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat disebabkan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau direksi berhenti karena kemauan sendiri (Damayanti, 2008 dalam Juliantari dan Rasmini, 2013). Dengan adanya pergantian manajemen, maka kebijakan-kebijakan yang ada sebelumnya di perusahaan akan berubah mengikuti kebijakan yang dibuat oleh manajemen baru, salah satu akibatnya yaitu *auditor switching*. Beberapa penelitian menunjukkan pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Dalam penelitian Aprillia (2013), Juliantari dan Rasmini (2013) menunjukkan pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* dan hasil penelitian Astrini dan Muid (2013) pergantian manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Sabeni (2014) menunjukkan bahwa perubahan manajemen berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Hal ini didukung oleh penelitian Chadegani *et al.* (2011) dalam hasil penelitiannya, perubahan manajemen ditemukan sebagai faktor penting yang menyebabkan *auditor switching*.

Kesulitan keuangan (*financial distress*) yang dialami perusahaan terjadi ketika perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya dan terancam bangkrut. Pergantian auditor juga bisa disebabkan karena perusahaan

harus menjaga stabilitas finansialnya, sehingga perusahaan mengambil kebijakan subyektif dalam memilih Kantor Akuntan Publik. Keadaan seperti ini mengakibatkan perusahaan cenderung melakukan pergantian KAP. Pratini (2013) menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara *financial distress* dan keputusan perusahaan untuk berpindah KAP. Di sisi lain Faradila (2016) menemukan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* tidak menjadi penyebab untuk mengganti KAP.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka peneliti memilih tiga faktor yang menjadi penyebab terjadinya *auditor switching* sebagai variabel independen yakni opini audit, pergantian manajemen, dan *financial distress*. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis opini audit, pergantian manajemen, dan *financial distress* terhadap *auditor switching* pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2016. Dari uraian diatas maka penelitian mengambil judul: **“Pengaruh Opini Audit, Pergantian Manajemen, dan *Financial Distress* Terhadap Auditor Switching (Studi pada perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2016)”**

1.3 Perumusan Masalah

Auditor switching merupakan pergantian Kantor Akuntan Publik maupun auditor yang disebabkan oleh *auditee* maupun auditor. *Auditor switching* adalah pergantian KAP maupun auditor yang memiliki sifat *mandatory* (wajib) dan *voluntary* (sukarela). *Auditor switching* yang bersifat *mandatory* adalah pergantian auditor yang diatur oleh regulasi. Sedangkan *auditor switching* secara *voluntary* adalah pergantian auditor yang dilakukan secara sukarela. *Auditor switching* dapat terjadi, salah satunya karena tingkat independensi auditor yang semakin berkurang akibat kontrak kerja atau perikatan kerja auditor dengan klien yang terlalu lama, serta kualitas dari pelayanan jasa yang diberikan tersebut sehingga menjadikan perusahaan mengganti auditor secara sukarela.

Berbagai penelitian mengenai *auditor switching* telah banyak dilakukan tetapi hasil penelitian selalu menunjukkan bukti empiris yang berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan Azhar L (2015) berhasil membuktikan adanya pengaruh pergantian manajemen dan *financial distress* terhadap auditor switching. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu (2017) membuktikan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Arezoo et al. (2011) menunjukkan hasil bahwa variabel pergantian manajemen, *financial distress*, dan opini audit tidak mempengaruhi *auditor switching*. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti ingin menganalisis pengaruh opini audit, pergantian manajemen, dan *financial distress* terhadap *auditor switching* karena masih terjadi ketidakkonsistenan hasil penelitian pada beberapa variabel. Setelah dijelaskan mengenai latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini akan mencoba menguji apakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi *auditor switching*.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* seperti opini audit, pergantian manajemen, dan *financial distress* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016?
2. Bagaimana pengaruh opini audit, pergantian manajemen, dan *financial distress* secara simultan terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial dari:
 - a. Opini audit terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016?
 - b. Pergantian manajemen terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016?

- c. *Financial distress* terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* seperti opini audit, pergantian manajemen, dan *financial distress* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh opini audit, pergantian manajemen, dan *financial distress* secara simultan terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari:
 - a. Opini audit terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016.
 - b. Pergantian manajemen terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016.
 - c. *Financial distress* terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian pengaruh opini audit, pergantian manajemen, dan *financial distress* terhadap *auditor switching* ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Aspek Teoritis

Adapun pembagian manfaat teoritis yang dibedakan menjadi dua kategori yaitu:

1. Bagi akademis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tentang audit terkait dengan masalah *auditor switching*.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sehingga dapat menambah pengetahuan sebagai dasar melakukan penelitian selanjutnya.

1.6.2 Aspek Praktik

Pada manfaat praktik dapat dibagi kedalam dua instansi yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Sebagai pertimbangan perusahaan untuk pengambilan keputusan dalam melakukan *auditor switching*

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi informasi kepada investor tentang faktor-faktor yang menyebabkan *auditor switching*.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penyusunan tugas akhir agar terarah dan berjalan dengan baik, maka sekiranya perlu dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan *auditor switching* sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independen yang digunakan, yaitu, opini audit, pergantian manajemen, dan *financial distress*. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh antar variabel tersebut baik secara simultan maupun parsial.

2. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang saling terkait, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diangkat, yang terdiri dari beberapa sub-bab. Secara garis besar, sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan dengan jelas dan ringkas hasil tinjauan kepustakaan yang terkait dengan topik dan variabel penelitian sebagai dasar penyusunan kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen (*auditor switching*) dan variabel independen (opini audit, pergantian manajemen, dan *financial distress*), definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel) serta teknis analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model hipotesis, dan pembahasan mengenai variabel independent (opini audit, pergantian manajemen, dan *financial distress*) terhadap variabel dependen (*auditor switching*)

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat mengenai kesimpulan hasil analisis yang telah dilakukan, serta saran yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.